



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 020/02022009
HARI : SENIN
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
1.	Forum Davos Gagal Beri Solusi Krisis Global	3
2.	INDONESIA – JEPANG: "Diplomasi Satwa" Bisa Tingkatkan Kerja Sama	4
3.	Obama Puji Kesuksesan Pemilu Irak	5
4.	Obama Pastikan Amerika Bisa Kerjasama dengan Dunia Islam	5
5.	Pemerintah Thailand Tolak Ultimatum Demonstran	6
6.	Selama Januari Malaysia Usir 3.125 TKI Ilegal	6
7.	Korea di Ambang Perang Besar: Korsel Tetap Keras terhadap Korut	7
II.	NASIONAL	
A.	POLITIK	
1.	Wapres: Dunia Akui Konsep Perdamaian Bermartabat Indonesia	8
2.	Indonesia Tidak Mengenal Politik Agama	9
3.	Chinese Indonesians recognize improvement	9
B.	EKONOMI	
1.	Pembatasan Impor Mulai Berlaku	10
2.	RI Butuh Teknologi Pertanian	10
3.	Kelapa Segar Sumsel Tembus Ekspor	12
4.	Ekspor Mebel ke Perancis Bisa Lebih Oke	12
5.	RI Pertahankan 154 Tarif Impor Logam	12
C.	SOSBUD	
1.	Indonesia Optimistis Permintaan Penundaan Paspor	13

			Hijau Terkabal	
		2.	DIPLOMAT: Dubes Aljufri Akui Banyak Calo Pemondokan Haji	14
		3.	Tourism up while spending down this year, says minister	15
		D.	HANKAM	
		1.	US destroyer docks in Bali for 'R & R'	16
		2.	Pembentukan Coast Guard Mendesak	16
		E.	HUKUM	--
		F.	OLAHRAGA	--
		G.	LINGKUNGAN HIDUP	--
		III.	ARTIKEL	
		1.	Dari Laut Wujudkan Kedaulatan Pangan (Oleh Muhammad Karim)	17
		2.	Penantian Dunia (oleh Irna Nadya Siregar)	19
		3.	PSSI Menuju World Cup? (Oleh Chappy Hakim)	19
		IV.	LAIN-LAIN	--
		V.	EDITORIAL	
		1.	Isyarat Buruk dari Semenanjung Korea	20

Jakarta, 2 Februari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Forum Davos Gagal Beri Solusi Krisis Global

Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dinilai gagal memberikan solusi atas krisis keuangan global. Forum tersebut hanya menjadi ajang debat dan adu argumen tanpa berujung pada solusi nyata.

Forum Davos hanya berakhir dengan seruan untuk membangun kembali sistem ekonomi global. Pendiri Forum Davos Klaus Schwab mengumumkan inisiatif pendesainan global untuk mereformasi perbankan, regulasi, dan pemerintahan. Selama lima hari, lebih dari 2.000 pengusaha dan pemimpin politik berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan krisis kapitalisme.

Hanya saja, sebagian besar diskusi hanya menggambarkan permasalahan, bukannya solusi. Tema forum kali ini yang merujuk pada "membelah pascakrisis dunia" hanya menjadi sebuah wacana prematur semata. Debat-debat yang berlangsung hanya memberikan ketidakpastian dari para pemimpin politik dan pengusaha kawakan. Mereka telah berusaha untuk menggali kedalaman krisis ekonomi dan mengeksplorasi bagaimana cara keluar dari krisis.

Hanya saja, tak ada seorang pun dalam forum tahunan itu yang menyuarakan prediksi ekonomi global akan semakin jatuh dan resesi berkepanjangan bakal terus berlanjut. Hanya ada peserta forum yang membuat kesimpulan dari pertemuan tersebut. "Kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan.

Padahal, kita harus cepat melakukan gerakan, dan kita harus cepat bergerak," demikian kata peserta forum yang tidak menyebutkan nama. Dengan kepastian-kepastian kuno itulah pasar bebas akan terus berjalan. Hendaknya para pelaku pasar bisa melaksanakan regulasi dengan cepat dan akurat tanpa harus menunggu regulasi baru. Menurut Profesor Schwab, situasi saat ini merupakan contoh sempurna di mana bank-bank dapat memimpin dan memikirkan kembali regulasi yang dibuat sendiri.

"Bank-bank tidak perlu menunggu pemerintah untuk memformulasikan regulasi," papar-paparnya seperti dikutip BBC. Sejumlah kalangan menilai sangat terlambat jika Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan para pembuat regulasi untuk menjamin berjalannya sistem keuangan internasional dengan mulus tanpa hambatan.

Usulan tersebut dianggap telah terlambat. Merkel juga mengusulkan dibentuknya dewan ekonomi di PBB seperti halnya dewan keamanan yang sudah ada. Merkel mengatakan masalah-masalah ekonomi saat ini perlu dimasukkan dalam suatu piagam untuk penanganannya.

Kemudian, Davos memang menjadi tempat yang layak untuk menunjukkan peta geopolitik dunia di mana China dan India semakin menunjukkan taringnya. Para pemimpin pemerintah datang ke Davos untuk bertatap muka dengan mitra, kolega, dan pengusaha ternama. Davos hanya menjadi ajang lobi untuk kepentingan masing-masing, bukan kepentingan bersama.

Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao dan PM Rusia Vladimir Putin pun menunjukkan peranan negaranya dalam forum tersebut. China mengaku ikut terimbas krisis global dan Rusia pun ikut jungkir balik ekonominya. Kedua negara mengisyaratkan kepada dunia bahwa krisis ekonomi memang mengglobal.

Setelah Davos, dunia pun fokus pada pertemuan G20 pada April mendatang di London, Inggris. Pemimpin negara-negara maju dan berkembang kembali akan berdebat mengenai bagaimana caranya keluar dari krisis. Apakah G20 mendatang akan menemukan formula penyelesaian krisis global? "G20 tidak akan menyelesaikan segala sesuatu. Forum tersebut tidak akan membahas isu itu," papar Schwab.

Sementara gagalnya pertemuan Davos juga dibenarkan oleh Kishore Mahbubani, Dekan The Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura. Kishore mengatakan, semua pihak telah kalah dalam forum Davos. "Tidak ada seorang pun yang paham bagaimana mengatasi krisis ini dan apa yang harus kita lakukan agar keluar dari belenggu ini," paparnya. Kishore berpandangan, dibutuhkan kembali pengujian fundamental sistem global untuk melihat seperti apa salahnya.

Nah, menurut dia, tidak ada seorang pun yang siap untuk menjawab pertanyaan tersebut di Davos. Yang ada dalam forum Davos adalah saling menyalahkan. Para pemimpin pemerintah dan pengusaha hanya menyudutkan Amerika Serikat (AS) yang memicu krisis keuangan terus berlanjut menjadi krisis global. "Davos hanya menjadi ajang debat global semata," papar Stephen Roach, kepala bank investasi Morgan Stanley.

"Kita kini memulai memasuki fase dari setiap krisis, yaitu permainan saling menyalahkan," imbuhnya. Sementara peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus melihat ada garis lurus dalam krisis keuangan kali ini. "Garis tersebut bukan hanya kekecewaan dan frustrasi," papar pendiri Grameen Bank di Bangladesh.

"Ini merupakan momen besar di mana kita membutuhkan perubahan. Kita tidak ingin kembali ke posisi normal di mana kita datang. Kita harus menciptakan krisis keuangan ini menjadi normal dan tetap memperjuangkan perubahan," kata Bapak Kredit Mikro tersebut. Hanya saja, dia tidak menyebutkan detail perubahan apa saja yang harus dilakukan.

Kesimpulannya, para pemimpin bisnis dan pemerintah kini lebih sibuk pada urusannya masing-masing untuk menjaga agar tidak terseret krisis yang berkepanjangan. Kebersamaan dalam mencari solusi masih nihil hasilnya. Hal itu terlihat karena petinggi bisnis di Wall Street malah banyak yang tidak hadir dan memilih membereskan masalah di kantor masing-masing.

Diwarnai Unjuk Rasa

Polisi Swiss bentrok dengan para demonstran yang menghalangi pertemuan forum ekonomi dunia di Davos. Para demonstran yang melempari mereka dengan bom molotov dibalas dengan gas air mata. Dalam kerusuhan itu polisi menangkap 60 orang demonstran. "Sekitar 60 orang kami tangkap, sedangkan 20 di antaranya kita lepas," ujar juru bicara polisi Jean- Philippe Brandt.

Dia menambahkan bahwa tidak ada yang terluka dalam bentrokan ini. Secara tentatif gerakan protes ini terus berlanjut, tetapi pemerintah wilayah tidak memberikan jaminan keamanan bagi mereka untuk menggelar demo di Kota Swiss bagian barat ini. Polisi harus menggunakan water canon untuk memblokir rencana rute perjalanan para demonstran. (Media Indonesia)

2. INDONESIA – JEPANG: "Diplomasi Satwa" Bisa Tingkatkan Kerja Sama

"Diplomasi Satwa" yang lama dijalankan Pemerintah Indonesia dan Jepang, melalui kerja sama satwa antara Kebun Binatang Yokohama Zoological Gardens atau Zoorasia Garden Jepang dan kebun binatang di Indonesia terbukti meningkatkan kerja sama pemerintahan kedua negara di bidang lainnya.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Minggu (1/2), ketika mengunjungi Zoorasia Garden di Yokohama, Jepang. Kalla berkesempatan memberikan nama kepada seekor bayi tapir yang terlahir di kebun binatang itu dengan nama La Baco. Dalam bahasa Bugis, artinya anak laki-laki yang berani.

Pada masa mendatang, ungkap Wapres, kerja sama dan hubungan kedua negara dipastikan akan jauh lebih dekat dan saling membutuhkan.

Dalam kunjungannya, Wapres didampingi, antara lain, Ny Mufidah Kalla, Achmad Kalla, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Farid Husain, dan pengusaha Rachmat Gobel. Hadir pula Presiden Zoorasia Garden Yokohama Shigeru Hashimoto.

"Kerja sama Indonesia dan Jepang dengan kerja sama antarsatwa akan terus meningkatkan hubungan dan kerja sama kedua negara juga di bidang lain. Kerja sama itu sudah berkembang lama," papar Wapres.

Menurut Wapres, upaya penangkaran sejumlah satwa langka asal Indonesia, seperti tapir dan burung jalak bali, di Kebun Binatang Yokohama akan memperbaiki lingkungan hidup dan keberagaman satwa di Indonesia. "Itu juga akan mendorong kita di Indonesia menjaga lingkungan hidupnya," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Shigeru berharap ada dukungan dari Pemerintah Indonesia terhadap kerja sama antara kebun binatang di Indonesia dan Jepang, terutama dalam penangkaran satwa langka.

Zoorasia Garden, yang dibangun 10 tahun lalu dengan luas sekitar 54 kilometer, dikelola Pemerintah Kota Yokohama. Di kebun binatang itu berhasil ditangkarkan satwa langka asal Indonesia, terutama tapir dan jalak bali. Bahkan, macan jawa yang di Indonesia nyaris punah hidup bugar di kebun binatang itu.

Kerja sama antara kebun binatang di Indonesia dan Jepang dirintis sejak 2004 hingga 2010. Tercatat, Kebun Binatang Yokohama telah melepas kembali 70 burung jalak bali ke Taman

Nasional Bali Barat, Pulau Bali. Sebanyak 30 ekor lainnya akan dikirimkan pada Maret 2010. Wapres juga mengunjungi Pasona O2 di Tokyo.(Kompas)

3. Obama Puji Kesuksesan Pemilu Irak

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memuji pemilu Irak yang berlangsung damai. Obama mengatakan, pemilu tersebut merupakan langkah penting bagi masa depan negara itu.

"Langkah maju tersebut akan meneruskan proses pengambilan tanggung jawab Irak untuk masa depan mereka," katanya. Jutaan warga Irak pergi ke tempat pemilihan untuk memilih dewan di 14 dari 18 provinsi di negara itu. Keamanan bagi pemilu tersebut sangat ketat dengan mengerahkan aparat polisi dan militer Irak.

Obama juga memuji bantuan teknis oleh PBB dan organisasi lainnya ke komisi pemilihan Irak. "Penting bahwa dewan telah duduk, memilih gubernur baru, dan mulai bekerja atas nama rakyat Irak yang memilih mereka," tandasnya.

Pemilihan pada Sabtu (31/1) dianggap sebagai pengujian penting terhadap sistem keamanan dan politik yang terus meningkat di Irak. Obama mengatakan, AS akan mulai bertanggung jawab meninggalkan Irak. Selanjutnya, dia mengerahkan kembali ribuan tentara tempur dari negara itu ke Afghanistan.

Sementara itu, lebih separuh jumlah pemilih turun ke tempat pemungutan suara. "Kedatangan pemilih mencapai 51%," ujar Ketua Komisi Pemilu Irak Faraj al-Haydari. Dia menambahkan, sekitar 7,5 juta dari 15 juta pemilih menggunakan hak suara mereka. Jelas, pemilu kali ini menunjukkan penurunan dibandingkan pemilu empat tahun silam, di mana persentase pemilih mencapai 55,7%.

Namun secara garis besar, pemilu kali ini lebih banyak diikuti warga Sunni Arab. Pasalnya, pada Pemilu 2005, warga Sunni memboikot pesta demokrasi tersebut.

"Sebenarnya kita memperkirakan jumlah warga yang memberikan suara lebih besar karena situasi di Irak berangsur normal," ujar juru bicara pemerintah Ali al-Dabbagh. Bagaimana hasil pemilu? Media-media memprediksi kandidat dari kubu Syiah akan mendapatkan kuat dari mayoritas warga.

Apalagi, para kandidat dari Syiah didukung pemerintahan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki. Meskipun Maliki tidak mengikuti pemilu kali ini, dia memberikan dukungan penuh pada kubu koalisinya. Menurut para pejabat Komisi Pemilu, Faraj al-Haidari, suara dukungan terhadap kubu Maliki menguat di Provinsi Maysan.

Provinsi tersebut merupakan mantan pendukung kuat ulama Syiah Moqtada al-Sadr dan milisi Al-Madhi. Sepertinya, Maliki cukup diuntungkan dengan kebijakannya yang bermain keras dengan kelompok-kelompok pengacau di Irak. Itu dibuktikan dengan perolehan koalisi Maliki di basis Syiah di selatan Irak.(Koran Sindo)

4. Obama Pastikan Amerika Bisa Kerjasama dengan Dunia Islam

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan bahwa dengan penuh percaya diri Amerika bisa bekerja sama dengan dunia Islam. Hal ini disampaikan Obama melalui suratnya ke Konferensi Organisasi Islam (OIC).

Melalui surat yang dikirimkan ke Sekretaris Jendral OIC Ekmeleddin Lhasanoglu, Obama mengatakan bahwa dia akan bekerja untuk meningkatkan hubungan dengan kelompok Islam, yang berbasis di Jeddah ini. Obama mengatakan terimakasih kepada OIC, yang mewakili 1,5 miliar umat Muslim di 57 negara.

Dalam surat terbukanya yang dipublikasikan koran-koran utama di Amerika, OIC meminta Obama untuk bekerja menyebarkan perdamaian di dunia. "Kami dengan hangat menyambut harapan anda dan mengharapkan ini adalah awal yang bagus untuk dialog dan tukar menukar informasi dengan lebih baik antara dunia barat dan muslim.(Tempo Interaktif)

5. Pemerintah Thailand Tolak Ultimatum Demonstran

Deputi perdana menteri Thailand, Minggu, menolak ultimatum ribuan demonstran yang menuntut pemerintah mundur, yang menimbulkan prospek bagi unjukrasa-unjukrasa lagi di kerajaan yang dilanda konflik politik itu.

Suthep Thaugsuban, salah seorang dari tiga deputi perdana menteri, mengatakan para pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra bebas melakukan unjukrasa lagi, tetapi menegaskan pemerintah baru yang dipimpin Partai Demokrat akan tetap berkuasa.

"Ini bukan saatnya untuk membubarkan parlemen -- rakyat menginginkan pemerintah tetap menjalankan pemerintahan negara," katanya kepada wartawan.

Sekitar 30.000 pendukung Thaksin yang mengenakan baju merah dan membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Kembalikan Demokrasi" bergerak ke kantor-kantor Gedung Pemerintah di Bangkok Sabtu petang.

Mereka memaksa melintasi pengadang-pengadang jalan yang dijaga polisi yang membawa senjata tongkat dan tentara, sementara ketegangan politik yang berkepanjangan antara faksi-faksi yang berseteru menunjukkan tidak ada tanda-tanda berakhir.

Para pemimpin protes mengatakan mereka akan kembali turun ke jalan-jalan dalam 15 hari kecuali Menlu Kasit Piromya dan tokoh-tokoh lainnya yang terlibat dalam blokade anti Thaksin atas bandara-bandara Bangkok tahun lalu mundur dan diadili.

Mereka juga menyerukan pembubaran parlemen, pemilu baru dan pemberlakuan kembali konstitusi tahun 1997.

"Tuntutan untuk memberlakukan kembali konstitusi tahun 1997 dalam 15 hari, tidak mungkin," kata Suthep. Ia juga memuji Kasit karena melakukan satu "pekerjaan yang baik."

Gedung Pemerintah diduduki selama tiga bulan tahun lalu oleh kelompok anti Thaksin yang memakai baju kuning Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), yang ingin menjatuhkan pemerintah Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang punya hubungan dengan Thaksin yang dipilih Desember 2007.

Kampanye mereka mencapai puncaknya akhir Nopember ketika mereka menduduki dua bandara Bangkok, satu pengepungan yang baru berakhir ketika sebuah pengadilan pada 2 Desember membubarkan PPP yang berkuasa, yang memungkinkan Partai Demokrat mengisi kekosongan pemerintahan itu.

Para pendukung PPP dan Thaksin, yang disingkirkan dalam kudeta tahun 2006 dan tinggal di pengasingan di luar negeri, mengecam tindakan itu sebagai satu "kudeta diam-diam" dengan dukungan militer dan merasa hak-hak demokrasi mereka dirampas.

PM Abhisit Vejjajiva juga dikecam oleh kelompok Baju Merah karena mengangkat Kasit, pendukung kuat PAD sebagai menlu, sementara dua simpatisan PAD lainnya telah dipilih sebagai penasehat pemerintah. (ANTARA)

6. Selama Januari Malaysia Usir 3.125 TKI Ilegal

Pemerintah Malaysia mengusir tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal sebanyak 3.125 orang melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selama Januari 2009.

"Jumlah TKI ilegal yang diusir dari Malaysia mencapai ribuan orang dalam setiap bulan," kata Kepala Sub Seksi Lintas Batas Imigrasi Kota Tanjungpinang, Ispaisah, Minggu (1/2).

TKI ilegal yang diusir pemerintah Malaysia selama Januari 2009 terdiri dari laki-laki 2.108 orang, perempuan 955 orang dan anak-anak 62 orang.

"Hampir setiap hari pemerintah Malaysia mendeportasi TKI bermasalah," kata Ispaisah seperti dikutip *Antara*.

Pada 31 Januari 2009, jumlah TKI yang diusir dari Malaysia ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura sebanyak 152 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 95 orang, perempuan 55 orang dan anak-anak 2 orang.

TKI ilegal tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang. Kemudian mereka ditempatkan sementara di penampungan TKI bermasalah di Jalan Transito Kota Tanjungpinang.

"Mereka akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan menggunakan kapal Pelni," tuturnya.

Hampir semua TKI ilegal yang ditangkap polisi Malaysia tidak memiliki dokumen lengkap sebagai pekerja asing di negara tersebut. Mereka sempat menjalani hukuman penjara di Malaysia sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Undang-undang

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta asosiasi tenaga kerja untuk tidak bertindak di luar hukum dan kewenangannya, sesuai Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Yakni melakukan penanganan tenaga kerja Indonesia pascakepulangan di Bandara Soekarno Hatta.

"Pemulangan TKI merupakan tanggung jawab pemerintah serta dilaksanakan sepenuhnya oleh BNP2TKI," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNP2TKI Rosyandi Moenzier di Jakarta Minggu (1/2).

Asosiasi tersebut adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), baik yang tergabung pada Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) maupun Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki).

Pada Minggu dini hari terjadi ketegangan dalam proses pemulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika itu Apjati berusaha mengambilalih pelayanan pemulangan TKI dari BNP2TKI. "Beruntung tidak terjadi bentrok antara aparat BNP2TKI yang bertugas melayani pemulangan TKI dengan Satgas Apjati," ujar Rosyandi.

Ditambahkan dia, apa yang dilakukan PPTKIS tersebut sudah menyerobot kewenangan negara dalam penanganan tenaga kerja Indonesia. Pasalnya Pemulangan TKI, merupakan tanggungjawab pemerintah serta dilaksanakan sepenuhnya oleh BNP2TKI sebagaimana ditegaskan pasal 95 ayat 2 (b) Undang-undang No 39/2004.

"Tindakan tersebut melawan hukum dan bisa dilaporkan secara pidana," ujarnya.

Sementara itu, DPP Apjati mengeluarkan surat tertanggal 28 Januari 2009, yang ditandatangani Ketua Umum Apjati Komjen Pol. Purn. Nurfaizi dan Wakil Sekjen Mustofa Najib, ditujukan kepada Dirut PT Assanacita Mitrabangsa. Isi surat itu menyatakan Apjati akan membenahi dan meningkatkan pelayanan pemulangan TKI dari Bandara Soekarno Hatta sampai ke daerah asal.

Sedangkan Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan lokasi terminal pemulangan TKI di Bandar Udara Soekarno Hatta masih merupakan wewenang kerja dari BNP2TKI.

"Selama UU No 39/2004 belum direvisi atau belum diubah, maka semuanya harus tunduk terhadap undang-undang ini," katanya saat melakukan pertemuan bersama wartawan di Bandung Sabtu (31/1). (Jurnal Nasional)

7. Korea di Ambang Perang Besar: Korsel Tetap Keras terhadap Korut

Korea Utara, Minggu (1/2), memperingatkan bahwa memburuknya hubungan dengan Korea Selatan telah membuat Semenanjung Korea di ambang perang. Media-media Korea Utara juga memperingatkan kehancuran Korea Selatan jika tetap mengabaikan ancaman Korea Utara.

"Kebijakan berkonfrontasi dengan Korea Utara yang dilakukan kelompok Korea Selatan adalah sumber konflik militer dan perang antara Utara dan Selatan," sebut kantor berita resmi Korut, KCNA.

"Bagi negara kami yang tengah dalam gencatan senjata, konfrontasi berarti meningkatnya ketegangan yang bisa mengarah pada konflik militer dan perang yang tidak bisa dihindari," sebut surat kabar milik Partai Komunis, Rodong Sinmun.

Korut dan Korsel secara teknis masih berperang karena Perang Korea tahun 1950-1953 hanya diakhiri dengan gencatan senjata, bukan traktat perdamaian. Kedua negara masih menempatkan lebih dari satu juta tentara di sepanjang perbatasan.

Ketegangan di Semenanjung Korea dipicu langkah Korut yang membatalkan semua perjanjian damai dengan Korsel, pekan lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, Korut telah berulang kali mengancam akan menghancurkan pemerintahan konservatif di Korsel yang dipimpin Presiden Lee Myung-bak. Lee menghentikan aliran bantuan ke Korut yang telah berlangsung selama 10 tahun sejak mulai berkuasa setahun lalu.

Menanggapi ancaman Korut, Presiden Lee menyatakan tetap akan mempertahankan kebijakan keras terhadap Korut. Dia menyatakan optimistis bahwa hubungan kedua Korea akan membaik dalam waktu tidak terlalu lama.

"Dalam perpecahan selama enam dekade, satu tahun ketegangan bisa diatasi guna memperbaiki hubungan antar-Korea," ujar Lee tanpa merinci cara mengatasinya.

"Meskipun barangkali perlu waktu pada awalnya, lebih baik bertolak menuju arah yang benar daripada terburu-buru menuju arah yang salah. Korea Selatan dan Korea Utara akan memulai kembali negosiasi dalam waktu dekat," katanya.

Tak terkalahkan

Di tengah merebaknya ketegangan, Pemimpin Korut Kim Jong Il melontarkan pujian bahwa tentaranya tidak akan terkalahkan. Kim yakin bahwa tentaranya mampu menggulung invasi mendadak dari musuh dengan sekali serang.

"KPA (Angkatan Bersenjata Rakyat Korea) telah berkembang menjadi angkatan revolusioner yang tidak terkalahkan, yang anggotanya akan membela partai dan pemimpinnya," kata Kim saat menginspeksi sebuah unit militer dan pembangkit listrik, Sabtu pekan lalu.

"Rakyat Korut siap meratakan gunung dan mengosongkan laut sekaligus jika diminta oleh Partai (Komunis)," kata Kim.

Menurut analis, ketegangan di Semenanjung Korea belum akan mengarah ke perang terbuka. "Ancaman Korut yang terus meningkat tidak mengindikasikan kekerasan besar di depan mata. Namun, ancaman itu bisa dengan mudah menandai babak lain konfrontasi laut taktis dengan Korsel di Laut Kuning," kata Bruce Klingner, ahli Korea pada Heritage Foundation, Washington.

Kedua Korea terlibat perang laut mematikan soal perbatasan di perairan Laut Kuning tahun 1999 dan 2002.

Pengamat juga menilai, taktik Korut meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dilakukan untuk mencari perhatian dari pemerintahan presiden baru AS, Barack Obama. (Kompas)

II. NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Wapres: Dunia Akui Konsep Perdamaian Bermartabat Indonesia

WAKIL Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, beberapa negara mengakui dan mempelajari konsep perdamaian yang bermartabat seperti yang dilaksanakan Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik, seperti di Ambon, Poso, maupun Nanggroe Aceh Darusalaam (NAD).

"Mereka mempelajari dan menghargai konsep perdamaian yang bermartabat bagi kedua belah pihak seperti yang telah dilakukan Indonesia. Model itu dianggap tepat," kata Wapres M Jusuf Kalla, se usai pemberian gelar doktor kehormatan bidang perdamaian dari Universitas Soka, di Tokyo, Jepang, Senin (2/2).

Wapres menjelaskan, beberapa negara seperti Thailand dan Sri Lanka berkonsultasi kepada Indonesia untuk mempelajari bagaimana menyelesaikan konflik dengan perdamaian yang bermartabat.

Mengenai penghargaan yang diberikan Universitas Soka Jepang kepada dirinya, dia mengatakan, itu sebagai kehormatan tidak hanya kepada dirinya tetapi kepada bangsa Indonesia.

"Tentu saja, saya berterima kasih karena Jepang begitu menghargai upaya kita untuk melaksanakan dan mengupayakan perdamaian dengan menyelesaikan berbagai konflik secara bermartabat," kata Wapres.

Dalam orasi berjudul "Perdamaian dan Pembangunan Bangsa", Wapres menegaskan bahwa perdamaian adalah keniscayaan yang harus diupayakan bersama, karena perdamaian adalah modal dasar untuk membangun.

Menurut Wapres tidak mungkin suatu bangsa bisa membangun tanpa adanya kedamaian.

Universitas Soka, Tokyo Jepang memberikan gelar doktor kehormatan kepada Wapres Jusuf Kalla, karena dia dinilai telah melakukan upaya yang keras dan gigih dalam menyelesaikan konflik melalui perdamaian.

Wapres Jusuf Kalla dinilai berhasil mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan melalui perdamaian. Universitas Soka selama ini memiliki perhatian khusus terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.

Beberapa tokoh dunia yang mendapatkan gelar doktor kehormatan dari universitas Soka, antara lain, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Mesir Husni Mubarak, Presiden Brazil Fernando Henrique Cardoso, Presiden Filipina Fidel Valdes Ramos, dan Presiden India KR Narayan. (Jurnal Nasional)

2. Indonesia Tidak Mengenal Politik Agama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram bagi kelompok golongan putih adalah sebuah kesia-siaan, karena Indonesia tidak mengenal politik agama. "Tidak menggunakan hak politik dalam pemilu, menurut saya halal hukumnya, karena golput juga merupakan bagian dari hak politik rakyat yang harus dihormati oleh komponen bangsa mana pun," kata pengamat hukum dan politik, Nicolaus Pira Bunga SH, MHum di Kupang, Sabtu (31/1). Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengemukakan pandangannya tersebut berkaitan dengan kontroversi fatwa MUI terkait dengan golongan putih dalam Pemilu 2009. Ia berpendapat, lembaga keagamaan mana pun tidak memiliki otoritas untuk mengatur hak politik rakyat, karena Indonesia yang berideologi Pancasila ini tidak mengenal politik agama dalam mengatur hak politik warga negara. "Menggunakan hak politik atau golput bukan persoalan rohani sehingga perlu diatur dalam sebuah fatwa. Langkah MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut terkesan sangat kontroversial, meski bermotivasi membangun kesadaran warga negara untuk menggunakan hak politiknya," kata Pira Bunga. (Sinar Harapan)

3. Chinese Indonesians recognize improvement

Chinese-Indonesians are beginning to enjoy the lowering of many major hurdles in living in the mainly Muslim country, a top Confucian leader says.

The only remaining problem is the issue of ID cards, over which ethnic Chinese residents still face discrimination in many parts of the country, said Indonesia Confucianism High Assembly (Matakin) chairman Budi S. Tanuwibowo.

He was speaking during a celebration in Jakarta on Sunday for Chinese New Year, which was attended by President Susilo Bambang Yudhoyono.

Some 6,000 Confucians were present at the event organized by Matakin.

In turn, Yudhoyono called on all state officials to improve their services to the country's Confucian and Chinese-Indonesian communities, saying all discriminatory acts against minorities must be put to an end.

He added there had been significant progress in the fulfillment of civilian rights for both minority groups over the last 10 years.

"I'm asking the religious affairs minister, the education minister and the justice and human rights minister, as well as all related parties in both central and local administrations, to continue to improve the quality of their services so as to fulfil the civilian rights of the Confucian and ethnic Chinese communities," Yudhoyono said in his address.

"In accordance with the 2006 Law on Citizenship, you [state officials] should not have any doubts about giving good service.

"There should be no more discriminatory treatment against anyone."

The improvement of minority groups' rights, the President added, could be found in marriage registrations, now available to Confucian couples.

It can also be seen in the education sector, with the Religious Affairs Ministry's issuance of two regulations legalizing the incorporation of Confucian teachings in school curricula.

"Also, the Center for Religious Harmony now serves Confucianism. And there are no more problems now about the establishment of houses of worship for Confucians," Yudhoyono said.

In response, Matakun's Budi Tanuwibowo acknowledged the improving conditions, citing "three big occurrences" last year, including the issuance of the two ministerial regulations and the granting of a plot of land at the Taman Mini Indonesia Indah theme park to establish a Confucian temple, whose ground-breaking ceremony will take place Monday.

Another "historic" occurrence was Yudhoyono's attendance, the first ever by a president, at the celebration last October of Prophet Kong Zi's 2559th birthday in Cibinong, West Java, Budi added.

"All problems [over the rights of Confucians and ethnic Chinese communities] are over now, except in the application of ID cards, which remains problematic in many regions," he said.

Indonesia officially began celebrating Chinese New Year after former president Abdurrahman Wahid in 1999 annulled a 1967 presidential instruction banning all activities related to Chinese traditions, including the practices of Confucianism teaching.

Three years later, Wahid's successor Megawati Soekarnoputri officially declared Chinese New Year a national holiday.

Yudhoyono, who is seeking another five-year term in office, seized upon Sunday's event to ask Confucians to vote during the upcoming legislative and presidential elections. (The Jakarta Post)

B. EKONOMI :

1. Pembatasan Impor Mulai Berlaku

Sebagian pengusaha di dalam negeri patut tersenyum. Pasalnya, mulai Minggu (1/2) kemarin, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag ini mengatur impor lima produk konsumsi, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), makanan dan minuman, sepatu, mainan anak, serta elektronik. Kelima produk itu hanya boleh masuk melalui lima pelabuhan utama. Selain itu, para importirnya wajib berstatus Importir Terdaftar (IT).

Pengusaha yakin, peraturan ini akan meredam serbuan produk impor. "Produk impor bakal semakin sulit masuk, sehingga produk makanan dan minuman di dalam negeri mempunyai peluang besar untuk mengambil alih pasar," kata Ketua Bidang Regulasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani, Minggu (1/2) kemarin.

Franky menambahkan, saat ini, banyak importir mulai beralih ke makanan dan minuman lokal. "Saya mendapat laporan bahwa importir semakin susah memasukkan produk makanan dan minuman impor. Sehingga, mereka pun terpaksa beralih ke produk lokal," ujar Franky.

Memang, kondisi ini belum signifikan mendongkrak omzet para pengusaha makanan dan minuman di dalam negeri. Namun, setidaknya, dengan pengetatan impor ini, pedagang tidak mempunyai banyak pilihan kecuali memajang produk buatan dalam negeri di gerai mereka.

Pengusaha elektronik juga merasakan dampak positif dari aturan baru itu. Sekretaris Jenderal Electronic Marketer Club (EMC) Handojo Soetanto bilang, pasar elektronik kini mulai dikuasai oleh para produsen elektronik di dalam negeri.

"Sebelum ada aturan itu, pasar dalam negeri masih dibayang-bayangi produk impor. Tapi, sekarang sudah jarang ditemui produk elektronik impor. Tentu, ini sangat bagus buat pengusaha lokal," ucap Handojo.

2. RI Butuh Teknologi Pertanian

Sektor pertanian Indonesia sudah saatnya menggunakan teknologi agar bisa bercocok tanam di segala tempat.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan sektor pertanian akan memiliki nilai tambah jika memakai peralatan tersebut. Salah satunya, hal itu memudahkan para petani dalam mengembangkan hasil pertaniannya.

"Kita melihat di sana ada teknologi. Dengan teknologi, di mana pun bisa bertanam," ungkap Kalla se usai meninjau pertanian di dalam ruangan Pasona O2 di Gedung Nomura B2F Otemachi, Tokyo, Jepang, kemarin. Meski demikian, tutur Kalla, Indonesia tidak perlu mengikuti Jepang yang telah lebih dulu membuat pertanian di dalam ruangan.

Selain mahal, Indonesia juga masih memiliki banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Seperti diketahui, pihak Pasona O2 menggunakan lampu berdaya 400 watt sebagai pengganti matahari. Kemudian, air yang digunakan untuk menyirami tanaman juga harus diganti setiap hari.

Selama sekitar satu jam, Wapres didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Mendiknas Bambang Sudibyo berkeliling mengunjungi setiap ruangan yang berada di bawah tanah tersebut. Saat di ruangan tiga, yakni tempat penanaman padi, Wapres tampak terkesima. Dia yakin, suatu saat Indonesia mampu menciptakan teknologi yang lebih baik dan mampu memberikan nilai tambah.

"Di negara kita, input teknologi lebih baik. Sekarang kita lihat kemampuan teknologi yang memungkinkan orang menanam di mana saja. Bahwa mahal iya, tetapi kita sudah swasembada," paparnya. Berbeda dengan Jepang, tutur Kalla, Indonesia tidak memerlukan tambahan lahan pertanian.

Saat ini yang diperlukan oleh para petani adalah pupuk yang cukup dan pengairan yang baik. Pada kesempatan ini Wapres dan Ibu Mufidah sempat mencicipi sayuran hasil pertanian yang menggunakan metode hidroponik tersebut. Bahkan, Kalla sempat bergurau saat memakan tomat berwarna kuning yang dinilainya lebih enak dibandingkan tomat warna merah.

"Kuning memang selalu lebih baik dari merah," seloroh Kalla disambut senyum para wartawan. Sementara itu, Group CEO and General Manager of Sales & Marketing Headquartes Pasona O2 Yasuyuki Nambu mengakui, biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun dan menjalankan pertanian di dalam ruangan cukup mahal. Namun, dia menjamin, meski ongkos yang harus dikeluarkan cukup mahal, terdapat satu nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pertanian di luar ruangan.

"Benar apa kata Yang Mulia Wapres Jusuf Kalla bahwa ongkos tinggi. Tapi ada nilai tambah di sini sehingga mendorong masyarakat untuk membeli. Selain itu walau ongkos besar, tidak ada kegagalan panen," ujar Nambu saat mendampingi Wapres meninjau Pasona 2 di Tokyo kemarin. Karena ongkos yang tinggi tersebut, ungkap Nambu, Pasona 2 belum berencana mengomersialkannya.

Namun, dalam waktu dekat Pasona 2 akan membuat pertanian ruangan di gedung berbeda. Di tempat baru tersebut rencananya akan ditanami buah-buahan tropis seperti mangga dan pisang. "Jadi pisang yang biasanya diimpor dari luar negeri, dengan Pasona 2 masyarakat Jepang bisa memanennya sendiri. Walau harganya tiga kali lipat lebih mahal, rasanya yang lebih enak," tuturnya.

Nambu mengungkapkan, proyek kedua pertanian di dalam ruangan nanti rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 18.000 meter persegi. Teknologi yang digunakan pun tidak menggunakan lampu lagi, melainkan tenaga surya. "Proyek kedua lebih hemat dan di ruangan lebih luas sehingga bisa mengembangkan tanaman apa saja. Selain itu bangunan juga bergabung dengan perkantoran," ujarnya.

Di tempat terpisah, Wapres juga menyempatkan diri untuk meninjau Yokohama Zoological Gardens serta memberikan nama bagi anak tapir jantan berusia empat bulan. Tapir yang lahir pada Oktober 2008 tersebut akhirnya diberi nama Labaco yang dalam bahasa Bugis berarti anak lelaki pemberani.

Sebanyak 14 tapir dikembangkan di Kebun Binatang Yokohama Zoological Gardens dan tujuh di antaranya adalah tapir Sumatera. Se usai mengunjungi kandang tapir, Wapres kemudian melihat tempat penangkaran jarak bali dan laboratorium yang berisi sperma hewan-hewan langka. (Koran Sindo)

3. Kelapa Segar Sumsel Tembus Ekspor

KOMODITAS kelapa segar dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), menembus pasar ekspor seperti ke Timur Tengah, Jepang, Vietnam, Nigeria, dan Somalia. Per bulan ekspor mencapai 2.000 ton dengan harga jula per kilogram (kg) US\$0,275.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel, Eppi Mirza mengatakan, penjualan kepala segar ini baru dimulai tahun lalu. Selain kelapa, semua komoditas asal Sumsel akan dija-jaki ke tiga benua itu.

Tahun 2009, akan meningkatkan ekspor nonmigas dan pasar tujuan. Selama ini, ada 10 komoditas unggulan dari daerah ini, dan beberapa yang hanya insidental atau tidak kontinu.

Tahun lalu, nilai ekspor nonmigas Sumsel US\$3,444 miliar meningkat 26,77 persen dibanding 2007 sekitar US\$2,714 miliar. Lalu volume ekspor mencapai 5,2 juta ton meliputi 21 komoditas terutama karet, pulp, minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO, batu bara, udang dan kayu lapis.

Komoditas non migas Sumsel ini diekpor ke 45 negara tujuan, antara lain, China, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, India, dan Jerman.

Tekan Impor

Di sisi lain, kata Eppi, pemerintah akan mencoba menelan laju impor ke Sumsek, antara lain, buah-buah segar dan terigu makanan dalam kaleng dan kemasan. "Kita akan menekan impor ini semaksimal mungkin. Meminimalkan impor pangan, dengan menggalakkan konsumsi makanan lokal. Seperti kacang rebusnya. Pengawasan kita perketat." (Jurnal Nasional)

4. Ekspor Mebel ke Perancis Bisa Lebih Oke

Pemerintah optimis pada tahun 2009 ini sebanyak 18,1 persen masyarakat Perancis atau sekitar 4,7 juta rumah tangga akan melakukan pembelian mebel. Hal itu berarti akan terjadi peningkatan pembelian mebel sebesar 2,3 persen.

Pada tahun 2008, masyarakat Perancis telah mengeluarkan pembelanjaan sebesar €9,65 miliar untuk mebel, volume pembelanjaan mebel yang menurun sebesar €30 juta dibandingkan tahun 2007.

Mebel Indonesia di pasar Perancis masih cukup prospektif. Hal ini ditunjukkan dari pengakuan para peserta pameran "Meuble de Paris" (Perancis, Belgia dan Spanyol) yang menyatakan bahwa sebagian besar produk mebelnya diproduksi di Indonesia, sedangkan mereka hanya membuat desain dan memasarkannya.

Mebel (HS 9403) menduduki posisi ke 3 komoditi utama ekspor Indonesia ke Perancis dengan nilai US\$113,15 juta selama periode Januari – Oktober 2008 atau meningkat sebesar 10,27% dibandingkan tahun 2007.

Sebenarnya Indonesia baru pertama kali turut ambil bagian dalam "Meuble de Paris" yang berlangsung di Paris, Perancis tanggal 22 – 26 Januari 2009. Dalam ajang tersebut, produk dari 4 perusahaan Indonesia yaitu PT Jaya Prima Mandiri, Marcelindo, Mia Collection dan Alvin berkat koordinasi KBRI Paris dan BPEN Depdag.

Indonesia sebagai peserta pemula, stand Indonesia banyak mendapatkan perhatian baik dari pengunjung maupun dari panitia penyelenggara. Desain stand Indonesia yang menampilkan motif batik dan tenun serta atap berbentuk jaring dianggap sangat unik serta mempunyai karakter yang kuat. Hingga akhir penyelenggaraan pameran, stand Indonesia mencatatkan nilai kontrak sebesar lebih kurang €750 ribu. (Kontan)

5. RI Pertahankan 154 Tarif Impor Logam

INDONESIA menunda penurunan tarif bea masuk (BM) 154 produk logam hingga 2010 atas permintaan industri dalam negeri. "Ini usulan industri dalam negeri semua terkait krisis ekonomi global," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Perdagangan (Depdag) Muchtar di Jakarta, Minggu(1/2), seperti dikutip *Antara*.

Tarif BM 154 produk logam tersebut pada 2008 berkisar antara lima sampai 20 persen. Rencananya pada 2009 tarifnya diturunkan antara 2,5 sampai lima persen.

Beberapa produk yang ditunda penurunan tarifnya antara lain jari-jari sepeda, kawat ban (HS 7217.10.31.00) tetap 12,5 persen, kawat berduri dari besi atau baja (HS 7317.00.00.00) tetap 15 persen, *corrugated nail*, paku payung dan pasak (HS 7317.00.90.40) tetap 15 persen. Lalu, bak cuci dan wastafel dari baja *stainless* (HS 7324.10.00.00) tetap 15 persen, pintu, jendela dan rangka serta ambang (HS 7610.90.00.00) tetap 20 persen.

"Pada 2010 nanti akan dibahas lagi apakah akan ditepati jadwal yang ada, diperpanjang atau ada skema baru. Sekarang belum diputuskan," ujar dia.

Menurut dia, dalam keadaan krisis ini ada beberapa sektor yang mengaku belum siap diturunkan tarifnya. "Hingga mereka minta jika produk-produk itu ditunda. Tujuannya pengamanan pasar dalam negeri."

Program harmonisasi tarif mulai dilakukan sejak 2005 dan berakhir pada 2010. Saat ini, rata-rata tarif BM impor Indonesia sebesar tujuh persen.

Produk lain

Indonesia akan menunda program harmonisasi tarif untuk 324 jenis barang menjadi 2010 untuk mengamankan pasar dalam negeri dari tekanan lonjakan impor.

Selain logam, produk lainnya antara lain 74 jenis produk elektronik, 24 jenis mesin, 12 jenis produk pertanian, dan 15 jenis produk perikanan.

Beberapa produk elektronik yang ditunda penurunan tarifnya, misal kipas angin meja dan kipas angin kotak (HS 8414.51.10.00), lemari pembeku dari tipe peti dan tipe tegak (HS 8418.30.00.00 dan HS 8418.40.00.00), pemanas air instan dan pemanas air celup (HS 8516.10.10.00 dan HS 8516.10.30.00).

Pengering rambut (HS 8516.31.00.00), microwave oven (HS 8516.50.00.00), pemasak nasi (HS 8516.60.10.00), pembuat kopi atau teh (HS 8516.71.00.00), pemanggang roti (HS 8516.72.00.00), ketel (HS 8516.79.00.00). Produk-produk tersebut seharusnya diturunkan tarifnya dari 15 persen menjadi 10 persen.

Selain peralatan rumah tangga elektronik, produk lain yang tetap 15 persen tarif impor adalah perekam pita kaset ukuran saku dan yang dengan amplifier (HS 8519.81.10.00 dan HS 8519.81.20.00), *compact disc player* (HS 8519.81.30.00), kamera digital lainnya (HS 8525.80.20.19), kamera perekam video (HS 8525.80.20.20), pemutar kaset rekaman ukuran saku (HS 8527.12.00.00), lampu bedah dan lampu sorot (HS 9405.20.10.00 dan HS 9405.20.90.10). (Jurnal Nasional)

C. SOSBUD

:

1. Indonesia Optimistis Permintaan Penundaan Paspor Hijau Terkabul

Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (BPIH dan SIH), Departemen Agama, Abdul Ghafur Djawahir, menyatakan pemerintah Indonesia optimis Arab Saudi mau mengundurkan pemberlakuan paspor hijau untuk jamaah haji Indonesia. "Peraturannya kan mulai 2009, Indonesia minta baru diberlakukan pada 2010," kata Ghafur, saat dihubungi Tempo, Senin (2/2).

Permintaan penangguhan, Ghafur melanjutkan, telah disampaikan lewat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. "Jika duta besar tidak bisa memberi jawaban, permohonan akan disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi (Menteri Luar Negeri Arab Saudi)," kata dia.

Secara resmi, menurut Ghafur, Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal Haji akan berkunjung ke Arab Saudi pada 11 Februari mendatang. "Selain untuk meminta penangguhan, juga memantau persiapan haji." Dalam kesempatan itu, pemerintah akan menjelaskan masalahnya, baik teknis maupun regulasi yang menghambat pemberlakuan paspor hijau pada musim haji 2009.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh jamaah haji sedunia menggunakan paspor internasional dalam pelaksanaan ibadah haji mulai musim haji 2009. Pemerintah Arab Saudi, menurut Ghafur, akan memberlakukan ketentuan ini kepada 46 negara pengirim jamaah haji yang menggunakan paspor khusus haji.

Peraturan itu dianggap menyulitkan posisi Indonesia. Pasalnya, berdasarkan UU Keimigrasian dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur jamaah haji Indonesia menggunakan paspor khusus haji atau dikenal dengan paspor coklat.

Terkait aturan itu, Ghafur menambahkan, pemerintah Indonesia belum menentukan sikap, apakah akan merevisi undang-undang atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. "Akan dilihat dulu karena pemilihan umum sudah dekat," kata dia. (Tempo Interaktif)

2. DIPLOMAT: Dubes Aljufri Akui Banyak Calo Pemandokan Haji

Duta Besar Luar Biasa RI dan Berkuasa Penuh untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman DR Salim Segaf Aljufri mengakui, banyak calo pemandokan haji di Arab Saudi yang menyebabkan permasalahan haji tidak kunjung selesai.

"Di pemandokan itu ada uang triliunan berputar di sana, jadi banyak yang tertarik. Selama sistem belum terbangun, akan tetap banyak calo di sana," katanya saat berkunjung ke kantor LKBN Antara di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, sistem penyediaan pemandokan bagi jamaah haji harus dibuat permanen dengan ketua Tim Verifikasi Haji dari pusat di Jakarta minimal harus dipegang eselon II, bukan pejabat setingkat Kasubdit.

"Sulit juga mencari siapa yang salah, sebab kebanyakan yang punya rumah menitipkan lagi kepada orang lain untuk disewakan," kata pria yang juga alumnus Universitas Islam Madinah itu.

Oleh karena itu, kata dia, jauh lebih baik jika pemerintah saja yang mengumumkan kepada semua pihak yang memiliki rumah di Mekkah agar menawarkan diri, tanpa perlu mencari-cari rumah sendiri.

Dia menegaskan, jika permasalahan pemandokan bagi 200 ribu jamaah haji Indonesia di Mekkah selesai maka selesai pula 80 persen masalah haji.

Dalam kesempatan itu, dia memuji sudah adanya penandatanganan perjanjian antara Depag dan kontraktor di Saudi Arabia soal pembangunan pemandokan bagi 100 ribu jamaah Indonesia di Mekkah.

"Kalau ada kontrak jangka panjang maka amanlah kita, karena seringkali ketika kita sudah mengontrak rumah, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak," katanya.

Dengan perjanjian itu pula, pembangunan pemandokan bagi jamaah haji Indonesia akan sesuai dengan selera pemerintah Indonesia sendiri dan disesuaikan dengan tradisi rakyat Indonesia.

"Misalnya ada TV untuk penerangan di setiap sudut, ada kamar mandi yang memadai, jangan 20 jamaah satu kamar mandi seperti yang sering terjadi," katanya.

Dalam penyelenggaraan haji 2008, pemandokan jamaah haji Indonesia di Mekkah menjadi masalah akibat jarak pemandokan yang jauh hingga 12-15 kilometer, sehingga mengurangi aktivitas ibadah di Masjidilharam.

Modus Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah menemukan modus pengelolaan ibadah haji dan Dana Abadi Umat (DAU) di Departemen Agama yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi. "Saya sudah melihat modus operasinya," kata Ketua KPK Antasari Azhar.

Namun demikian, Antasari tidak menjelaskan lebih lanjut modus pengelolaan ibadah haji dan DAU tersebut. Antasari hanya mengatakan, modus tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada kasus di Departemen Agama yang menjerat mantan Menteri Agama Said Agil. "Kalau modusnya sama mengapa tidak kita tindaklanjuti," kata Antasari.

Menteri Agama periode 2001-2004 Said Agil Husein Al-Munawar pernah terjerat kasus dugaan korupsi. Said Agil dituduh menyalahgunakan DAU sebesar Rp 719 miliar. Kali ini, Departemen Agama kembali disorot dengan dugaan korupsi pengelolaan ibadah haji dan DAU.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sejumlah aliran dana yang diduga diterima Menteri Agama Muhammad Maftuch Basyuni ke KPK.

Koordinator Bagian Investigasi ICW Agus Sunaryanto mengatakan, dana yang diduga diterima Maftuch berasal dari dua sumber, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji dan DAU. "Ali-rannya antara lain dalam bentuk tunjangan fungsional," kata Agus.

Berdasarkan data ICW, Maftuch diduga menerima enam kali tunjangan fungsional untuk November 2004 sampai April 2005. Nilai tunjangan fungsional tersebut adalah Rp 10 juta per bulan.

Selain itu, ICW menduga Maftuch menerima dua kali tunjangan perjalanan dinas ke Arab Saudi, masing-masing sebesar 5 ribu dolar AS (16 Februari 2005 dan 4 April 2005).

Maftuch juga diduga menerima biaya persediaan perjalanan dinas dari Riyadh ke Jeddah sebesar 1.300 dolar AS pada 15 September 2005.

Kemudian ICW menyatakan, Maftuch menerima sejumlah uang dari DAU. Aliran DAU kepada Maftuch diduga dalam bentuk tunjangan fungsional sebesar Rp 15 juta (30 November 2004), biaya perjalanan dinas ke Abu Dhabi sebesar 7.500 dolar AS (4 November 2004), biaya open house sebesar Rp 60,6 juta (9 November 2004). (Suara Karya)

3. Tourism up while spending down this year, says minister

Tourism and Culture Minister Jero Wacik expressed optimism that the country's tourism industry will remain strong this year, though tourists would spend less due to the global financial crisis.

During a visit to the XII summit of the Bali chapter of the Indonesian Hotel and Restaurant Association (PHRI) in the Royal Pitamaha hotel in Ubud, Gianyar, on Saturday, Jero said tourism will remain strong despite concerns that the global financial crisis would deter people from holidaying.

"The global financial crisis will not prevent people from holidaying. It will just deter them from traveling far. So expect Germans to just travel to Spain instead of Indonesia," he said.

"But at the same time, tourists in Asian countries would be doing the same thing, and we can expect more travelers from Japan or Taiwan."

The concerns stemmed from the fact that Indonesia missed its original target of 7 million foreign tourists by the end of 2008, recording 6.4 million arrivals instead.

The 6.4 million is in line with the ministry's revised target however, with Jero quickly adding that the number was still higher than 2007, which saw slightly more than 5.5 million arrivals.

The revision to the target was made in October.

He added that the tourism industry last year generated an income of US\$7.5 billion, significantly higher than the expected \$ 6 billion in the ministry's revised target. Jero predicted that Indonesia would see 6.5 million tourists by the end of 2009.

"It's a moderate target, but still higher than our record in 2007," he said.

He said the global financial crisis would hit tourists "pockets" though, further predicting that average tourist spending per visit would decrease from \$1,170 in 2008 to \$1,000 this year.

He reminded participants that this was still an increase on the record figure in 2007 when tourists spent an average of Rp \$970 per visit.

He told tourist sector businessmen not to worry about the decreased spending, saying that domestic travelers has been spending more and more within the past years.

Meanwhile, according to data from the Central Statistics Agency, domestic travelers' expenditure rose to an average of Rp 406,350 (US\$34.37) per trip in 2007 from Rp 324,000 in 2001.

Indonesians have also been traveling more, as the same data recorded an increase to about 116 million travelers in 2007 from 103 million in 2001.

Jero said he had begun several programs to boost domestic travel such as working out a plan with the Bali General Election Commission to turn this year's campaign season into an arts and culture festival.

"This year, domestic travelers will be our secret weapon," Jero said. (The Jakarta Post)

D. HANKAM :

1. US destroyer docks in Bali for 'R & R'

The United States' ship Lassen (DDG 82), an Arleigh Burke-class guided missile destroyer, anchored at Benoa harbor Saturday morning for a four-day rest and recuperation period for its 330 crew members.

The seven-year-old-warship, which is 155 meters long and 18 meters wide, departed from Dili, Timor Leste, on Jan. 29, where its crew partook in a humanitarian aid mission, according to the official website for the US 7th Fleet.

Cmdr. Anthony Simmons, the ship's commanding officer, said the holiday represented a chance for his crew to get to know the Balinese locals during a number of events, including a dinner hosted by the Indonesian Navy.

"While here, we are going to a reception hosted by the Indonesian Navy. My sailors plan to get out and do some tours in order to gain another recreation and to get the nice opportunity to be here in Bali as well as participating in other sporting events held by the Indonesian Navy," he told reporters on Saturday.

He declined to reveal the next destination of the US\$800 million destroyer, saying, "It's a standing US policy that we don't discuss particular routes we take".

Also present on board Saturday, was Vice Admiral John Bird, the 46th commander of the US 7th Fleet, who came to Indonesia to visit senior officers of the Indonesian Navy in Jakarta and Surabaya, East Java, to maintain ties between both Navies.

"We have overall 150 engagements per year with the Indonesian Navy, small and large. Some different exercises and engagements we do on a navy to navy level," he said, adding that the US Navy's warships had visited other countries in Asia. Bird said he had appreciated the supportive reception of the Bali provincial administration during his first visit to island.

The Arleigh Burke class is one of the largest and most powerful destroyers in the United States' Navy.

Lassen, which was christened after a naval helicopter pilot who earned the Medal of Honor after an intrepid mission to save two downed aviators in Vietnam, is a graceful and extremely fast warship. Two Seahawk helicopters could be seen on its deck.

Lassen is assigned to the 15th Destroyer Squadron and is deployed to Yokosuka, Japan. The ship is part of the US 7th Fleet, the largest in the country's Navy, with some 60 to 70 ships, 200 to 300 aircraft and 40,000 sailors and marines on active duty. (The Jakarta Post)

2. Pembentukan Coast Guard Mendesak

Ego sektoral masing-masing instansi masih menjadi tantangan terberat. PENGAMANAN dan penegakan hukum di laut terkesan kurang efektif, bahkan tidak efisien. Padahal, Indonesia memiliki 13 instansi pemerintah yang berwenang di laut antara lain, TNI AL, Polisi Perairan, Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai (KPLP) Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Bea Cukai.

"Penyebab utamanya antarinstansi hanya mengutamakan dan mementingkan ego sektoralnya," kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno saat rembug nasional yang digelar Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Sabtu (31/1).

Tak hanya itu, tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan berimplikasi pada belum adanya keterpaduan operasional di lapangan.

Dia mengakui, saat ini telah terbentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun, fungsinya yang hanya bersifat koordinatif membuat hasil akhir pelaksanaan tugasnya tidak optimal.

Kondisi ini, kata Tedjo, membuat sinergi kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seluruh instansi mendesak dilakukan. Harus ada institusi tunggal, semacam *coast guard* yang diberi kewenangan penuh mengamankan dan penegakan hukum di laut.

"Apa pun nama badan hukum tersebut, sudah saatnya direalisasikan," kata KSAL. Dia memberikan beberapa alternatif guna mendorong percepatan keinginan tersebut. Pertama dengan membentuk organisasi baru. Pemerintah dapat lebih leluasa membentuknya dan lebih flek-

sibel dalam pemenuhan persyaratan sesuai kualifikasi yang diinginkan. Resistensi konflik kepentingan dari instansi yang berwenang saat ini juga relatif kecil.

Alternatif kedua, tambahnya, dengan membentuk *coast guard* yang cikal bakalnya berasal dari Bakorkamla dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki 13 instansi yang ada.

"Namun resistensi kepentingan dengan instansi lain masih berpeluang terjadi pada alternatif ini," kata lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1975 itu.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo berharap, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan pembentukan *Sea and Coast Guard* menjadi momentum mewujudkan lembaga yang memiliki kewenangan penuh menjaga keamanan laut dan pantai.

"Kami siap merancang draf awal rancangan peraturan pemerintah tentang *coast guard*," katanya. Payung hukum lewat Peraturan Pemerintah pun dianggap cukup, asalkan semua instansi terkait sepakat. Penjurunya pun tetap, yaitu menteri perhubungan.

"Kalau tak ada aral melintang, 2009 lembaga ini dapat terwujud," kata Budhi.

Dia yakin, pembentukan lembaga satu pintu ini akan mendorong keyakinan dunia internasional terkait keamanan di laut Indonesia.

Budhi mengakui, selama ini ego sektoral dan buruknya koordinasi menjadi tantangan terbesar lembaganya. Ego ini, kata dia, selama dua tahun pembentukan Bakorkamla telah dicoba dieliminasi. Salah satunya, melalui pertemuan bulanan yang dihadiri seluruh otoritas keamanan laut. (Jurnal Nasional)

E. HUKUM : Tidak Ada

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. Dari Laut Wujudkan Kedaulatan Pangan (Oleh Muhamad Karim)

Ancaman krisis pangan masih saja menghantui Indonesia. Sekalipun tahun 2008 dinyatakan dapat berswasembada beras, ketidakpastian iklim global saat ini juga menjadi ancaman serius.

Hujan yang melanda Pulau Jawa awal tahun 2009 ini telah menghancurkan ribuan hektare sawah. Kondisi ini tentu amat mengkhawatirkan. Upaya menciptakan keanekaragaman pangan adalah sebuah keniscayaan, salah satu sumbernya dari lautan. Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km² menyediakan sumber pangan melimpah. Lautan menyediakan sumber pangan berupa ikan, crustacea, kerang-kerangan, dan rumput laut. Masalahnya, kita memanfaatkan sumber pangan lautan ini sering kali masih dalam bentuk segar, kecuali rumput laut. Ekspor ikan Indonesia pun masih dalam bentuk ikan segar. Proses diversifikasi pangan bersumber dari lautan masih minim. Kalaupun ada kuantitasnya relatif terbatas, seperti nugget ikan, bakso ikan, dan jenis pengolahan lainnya. Ikan masih dominan diolah secara tradisional, menjadi ikan asin, ikan kering, dan ikan kayu. Kita belum menemukan makanan cepat saji berbahan baku ikan. Kebanyakan makanan cepat saji masih berbahan baku daging ternak besar maupun unggas. Bahkan, merek dagangnya pun dari luar negeri.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, kultur pangan. Sekalipun perairan laut Indonesia amat luas, jumlah penduduk Indonesia yang mengonsumsi sumber pangan dari lautan relatif kecil. Konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita baru mencapai 25 kg per tahun. Bandingkan dengan Jepang yang mencapai di atas 100 kg per kapita per tahun. Kondisi ini berkorelasi dengan kultur masyarakat Indonesia. Pulau Jawa yang penduduknya mencapai 60% dari total penduduk Indonesia tidak memiliki tradisi pangan seafood. Sementara itu, sebagian besar penduduk luar Jawa mengonsumsi ikan, seperti Sulawesi, Maluku, Papua,

dan sebagian besar pesisir Sumatera dan Kalimantan. Akan lebih afdol, jika pemerintah dan masyarakat mulai membudayakan konsumsi pangan bersumber dari lautan.

Bermazhab Beras

Kedua, teknologi. Penguasaan teknologi pengolahan pangan lautan masih berkatut pada teknologi tradisional. Model teknologi pengolahan ikan asing, kering, ikan kayu, dan pindang masih mendominasi. Kita belum mencapai teknologi madya dalam pengolahannya. Buktinya, Indonesia sampai kini masih saja mengimpor tepung ikan dan garam. Industri tepung ikan maupun garam kita terbentur problem teknologi. Makanya, mengupayakan pengembangan teknologi pengekaranagaman pangan menjadi penting.

Ketiga, gejer budaya. Masyarakat Indonesia kerap kali mengalami problem "gejer budaya" termasuk dalam aspek pangan. Masyarakat merasa kurang percaya diri apabila tidak mengonsumsi pangan yang berlabel asing. Apalagi, kalangan muda Indonesia, menganggap diri "kampungan" bila belum masuk restoran cepat saji yang namanya sudah marketable. Padahal, gizi makanan cepat saji belum tentu mengandung asupan gizi yang mencukupi kebutuhan tubuh manusia. Kemenangan usaha makanan cepat saji—sebagian besar milik perusahaan multinasional—adalah citra yang terbentuk. Padahal, kalau mengembangkan makanan cepat saji berbahan baku ikan dibarengi citra tersendiri akan lain ceritanya. Apalagi yang melakukannya masyarakat kita sendiri. Upaya ini selain mengandung unsur nilai-nilai kebangsaan, juga mampu "menganekaragamkan" produk pangan. Diversifikasi pangan tak hanya bersumber di daratan, melainkan juga di lautan. Implikasinya, Indonesia jauh dari ancaman krisis pangan.

Keempat, politik pangan Indonesia selama ini cenderung bermazhab beras. Penganekaragaman pangan dan produknya masih sebatas slogan. Sebab, ukuran keberhasilan mencapai swasembada pangan bukan sekadar indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan melainkan juga sebagai dagangan politik pemegang pemerintahan yang sedang berjalan. Padahal, apabila pemerintah membebaskan rakyat untuk mengupayakan keanekaragaman dan mendiversifikasikan pangannya, hal itu otomatis akan menjauhkan rakyat dari ancaman krisis. Salah satunya melalui sumber pangan dari lautan. Inilah yang kurang mendapatkan perhatian serius sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, maupun pada masa reformasi hingga saat ini. Politik pangan semacam ini telah menggerus kearifan lokal rakyat di pedesaan pesisir maupun pedalaman dalam menyediakan pangan secara berdaulat.

Urgensi Kedaulatan

Dalam medio awal tahun 2009 ini, di Manado akan berlangsung konferensi kelautan dunia atau World Ocean Conference (WOC). WOC ini akan dihadiri lebih dari 100 negara dari berbagai belahan dunia. Forum ini pasti akan membahas agenda-agenda penting mengenai kelautan dunia. Amat penting forum ini juga memasukkan isu "kedaulatan pangan" yang bersumber dari lautan sebagai salah satu agendanya, karena ancaman krisis pangan sudah menjadi kepedulian seluruh masyarakat dunia internasional.

Ancaman iklim global yang sudah menjadi kekhawatiran dunia, termasuk pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Barack H Obama yang baru saja dilantik, mendapatkan prioritas. Iklim global memang akan menaikkan suhu permukaan bumi dan permukaan lautan. Tapi, dampak lanjutannya akan mengancam sumber pangan di darat maupun lautan. Iklim global akan menimbulkan kekeringan, banjir, badai dan topan yang menimbulkan kegagalan panen dari pertanian tanaman pangan. Juga, kenaikan suhu lautan mengancam kehidupan terumbu karang yang menjadi habitat ikan, dan terputusnya mata rantai makanan di lautan.

Apabila rantai makanan terputus, berbagai jenis plankton yang rentan terhadap perubahan suhu ekstrem akan mengalami kematian. Padahal, plankton selain berperan sebagai produktivitas primer yang menghasilkan oksigen juga berperan sebagai sumber pakan bagi jenis ikan pada tingkatan suatu level rantai makanan di lautan. Berbagai riset tahun 2007 memprediksikan, apabila dampak iklim global ini tak diatasi maka baru pada tahun 2050 kita akan menikmati lagi seafood.

Mengapa? Terputusnya suatu komponen dalam rantai makanan akan memutuskan suatu sistem kehidupan dalam lautan. Maka, ide mengupayakan keanekaragaman pangan dan produknya bersumber dari lautan menjadi keniscayaan guna mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi, pangan tak hanya bersumber dari daratan semata. Inilah substansi mengapa isu kedaulatan pangan menjadi urgen untuk diangkat dalam forum WOC. (Sinar Harapan)

2. Penantian Dunia (oleh Irna Nadya Siregar)

BARACK Obama adalah mimpi baru dunia internasional. Pesta pelantikan yang meriah dan berbagai sambutan positif dari negara-negara Eropa dan Asia adalah buktinya.

Bahkan dunia Islam pun menaruh harapan besar kepadanya. Hampir dua minggu sudah Obama menjalankan tugasnya. Namun kekecewaan muncul lebih cepat. Dalam sebuah pidatonya setelah dilantik menjadi presiden, Obama menyatakan perlindungan kepentingan warga sipil Israel adalah prioritasnya dan kepada warga sipil Palestina yang menjadi korban serangan Israel, Obama "hanya" menyatakan simpatinya.

Padahal, konflik Israel-Palestina, khususnya krisis kemanusiaan di Gaza, belum berakhir hanya dengan gencatan senjata. Blokade Israel atas Gaza sejak Hamas memenangi pemilu membuat anak-anak menderita gizi buruk. Menurut pengamatan Lembaga Save The Children, 55% anak usia 5–11 tahun mengidap insomnia dan menurut psikolog Samir Zaquit dari Gaza Community Mental Health Programme, serangan bom dan peluru kendali Israel menyebabkan anak-anak mengidap tekanan pascatraumatis seperti depresi, insomnia, bahkan skizofrenia.

Janji Obama berdiplomasi dengan dunia Islam dibuktikan dengan memerintahkan utusan khusus Timur Tengah George Mitchell untuk berbincang-bincang dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan mengunjungi Israel serta Tepi Barat. Namun dunia masih dibuat menunggu apakah perbincangan ini akan benar-benar mengakomodasi kepentingan warga Timur Tengah mengingat perwujudan perdamaian di Timur Tengah harus memperhitungkan keberadaan Iran, Suriah, Hezbollah, dan tentu saja Hamas.

Penarikan pasukan dari Irak pun sekadar menjadi pemanis karena ternyata pasukan tersebut ditarik untuk dipindahkan ke Afghanistan. Perdamaian sejatinya adalah penyelesaian konflik, bukannya memicu konflik dengan memindahkannya ke tempat baru.

Dear Mr Obama, sampai kapan dunia dan keadilan kemanusiaan harus menunggu? Jangan sampai kehisteorisan yang terjadi di awal pemerintahan menjadi ironi seperti komentar Vladimir Putin saat pelantikan Januari lalu, "...kekecewaan mendalam akan muncul dari harapan besar. Ekspresi kesungguhan dan keterbukaan Obama hanya tampak di luar saja." (Koran Sindo)

3. PSSI Menuju World Cup? (Oleh Chappy Hakim)

Minggu lalu terlontar berita yang cukup mengejutkan, yaitu tentang PSSI yang sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia sepak bola.

Satu ide yang cemerlang untuk muncul kembali di pentas dunia dari cabang olahraga yang paling populer di Tanah Air. Setelah Asian Games dan The Games of the New Emerging Forces (Ganefo) puluhan tahun yang lalu, rasanya memang Indonesia sudah tenggelam di dasar laut dalam ajang dunia, kecuali beberapa cabang seperti bulutangkis dan tinju barangkali.

Apalagi bila membicarakan ide tentang Indonesia sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga bergengsi. Terakhir sudah ada upaya dari KONI yang untuk pertama kalinya berhasil dengan sukses menggelar Asian Beach Games di Bali. Reaksi yang muncul terhadap ide PSSI itu pada umumnya adalah kaget, sinis, dan bahkan banyak yang menganggapnya sebagai lelucon belaka.

Ada pula yang mengatakan ide itu sebagai "matiketawa ala PSSI". Walaupundemikian, ada juga yang mendukung upaya ini. Pada dasarnya, kita haruslah menghargai siapa pun yang mempunyai ide positif untuk memajukan cabang olahraga sepak bola di Tanah Air ini.

Di sisi lain, para penggagas ide seyogianya juga dapat menempatkan posisinya sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh dukungan yang maksimal dari seluruh masyarakat. Sebabnya sederhana sekali, karena cabang sepak bola adalah cabang olahraga yang sangat digandrungi seluruh rakyat Indonesia. ***

Mengapa begitu banyak yang menertawakan gagasan ini? Sebab, ide yang dilontarkan tersebut tidak terlihat sebagai ide atau gagasan yang telah dilandasi perencanaan yang matang. Walaupun waktunya masih sangat lama dalam hitungan kalender, yaitu lebih 10 tahun yang akan datang, untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola sekelas World Cup sangat dibutuhkan perencanaan yang matang serta terpadu.

Penyelenggaraan kejuaraan berkelas dunia sudah pasti memerlukan kerja terpadu dari seluruh lini pemerintahan serta pihak swasta. Perhelatan yang sangat bergengsi seperti ini tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya dukungan dari seluruh slagorde nasional. Ide ini seharusnya

nya merupakan ide yang “nationwide”, bukan PSSI semata. Ini mungkin mengapa kemudian banyak orang melihat PSSI sepertinya sudah berjalan seorang diri menuju Piala Dunia.

Bisa jadi pandangan negatif itu salah, tetapi adalah sebuah kenyataan masyarakat luas melihatnya seperti itu. Paling tidak, orang dapat melihat dalam official website of PSSI di internet tidak ada perencanaan tentang hal ini, bahkan lembar “program” dalam situs itu kosong! Mengajak banyak pihak untuk mengerjakan pekerjaan besar seperti penyelenggaraan Piala Dunia adalah satu tindakan yang harus dipertimbangkan masak-masak.

Dengan ajakan tersebut, akan diperoleh dukungan yang diperlukan. Namun ajakan tentu harus terlebih dahulu didiskusikan dengan matang tentang banyak hal yang terkait dengan kemungkinan dapat dilaksanakannya pekerjaan besar itu. Di sinilah kemudian akan muncul ide yang masuk akal dan akan serta-merta memperoleh dukungan yang baik.

Dalam kacamata orang awam penggemar berat sepak bola di Tanah Air, tergambar masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dulu oleh PSSI. Mulai dari masalah dengan FIFA tentang kasus Ketua Umum PSSI sampai dengan prestasi tim nasional yang tidak kunjung meningkat dari waktu ke waktu.

Belum lagi tentang kemampuan PSSI menyelenggarakan kompetisi yang selalu saja berakhir ricuh berkepanjangan. Munculnya penonton fanatik yang kerap membakar-bakar bangku stadion sampai kini pun belum dapat ditangani dengan baik. ***

Berbicara tentang prestasi PSSI, prestasi terbaik yang pernah dicapai oleh tim nasional PSSI yang antara lain masih tersimpan dalam ingatan adalah berhasil menahan imbang 0-0 juara Olimpiade Melbourne saat itu, tim kesebelasan Rusia (1956). Berikutnya, berhasil menjadi juara ketiga di Asian Games (1958), juara pertama di SEA Games (1987 dan 1991).

Selebihnya, hampir dapat dikatakan tidak ada yang patut dibanggakan. Kemampuan PSSI dalam menyelenggarakan turnamen sepak bola masih banyak yang harus disempurnakan. Masyarakat sudah bosan melihat perkelahian antarpemain di lapangan. Perkelahian ini acap justru dipelopori oleh pengurusnya sendiri. Kondisi perwasitan pun kelihatannya masih memerlukan pembinaan yang lebih baik, di samping penghargaan pemain terhadap wasit terlihat sangat kurang.

Sering kita menyaksikan wasit yang dipukuli oleh pemain dan oleh penonton maupun pengurus klub. Upaya peningkatan kualitas dan prestasi tim nasional Indonesia belum juga terlihat membawa hasil yang memuaskan. Gambar yang muncul ke permukaan justru memperlihatkan tidak kapok-kapoknya PSSI menjalankan program yang sifatnya instan alias potong kompas. Kalau tidak salah, pada 1980-an PSSI mengirim timnya untuk berlatih di Brasil.

Berikutnya pada 1990-an kembali dikirim tim ke Italia yang bernama Primavera, selanjutnya ke Uruguay, dan terakhir pada 2006 ke negeri Belanda. Tidak ada satu pun yang kemudian berhasil secara tim, selain melahirkan beberapa pemain yang cukup andal untuk ukuran kawasan sendiri. Seharusnya mudah dimengerti bahwa dalam olahraga, lebih-lebih seperti sepak bola, untuk dapat memperoleh prestasi tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain dari latihan yang keras dan pengalaman bertanding dalam kompetisi yang ketat.

Hal ini pun tidak banyak gunanya bila para pemain tidak diperoleh dari hasil binaan sebelumnya, yaitu yang dikenal dengan pembinaan pemain di usia dini. Bukti sudah terlihat dari hasil prestasi tim PSSI pada 1950-an di bawah asuhan Tony Pogacknik, demikian pula pada era Wiel Coerver pada 1970-an. Mengapa harus mengulang kembali untuk menjalankan metode potong kompas?

Harus diingat bahwa hasil yang selama ini kita nikmati adalah bahwa PSSI berada di peringkat 140-an FIFA, di bawah Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Itulah semua gambar besar dari PSSI yang kita cintai ini. Sekarang tinggal tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, apa yang akan menjadi pilihan kita ke depan?

Apakah akan membenahi tim PSSI kebanggaan nasional dengan memulainya secara intensif pembinaan pemain usia dini sekaligus mencoba menjalankan kompetisi yang bergulir secara konsisten tiada henti atau kita tetap mengirim tim ke luar negeri secara temporer dan sekaligus mempersiapkan diri saja untuk menjadi penyelenggara kejuaraan dunia sepak bola di Indonesia? Hanya kepala dingin dan akal sehat yang dapat memberikan jawaban yang tepat untuk ini. (Koran Sindo)

IV. LAIN-LAIN : Tidak Ada

V. EDITORIAL :

1. Isyarat Buruk dari Semenanjung Korea

Keputusan Korea Utara membatalkan semua perjanjian damai dengan Korea Selatan mengejutkan, memprihatinkan, sekaligus amat disesalkan.

Dalam pernyataannya yang dikeluarkan hari Jumat lalu, Pemerintah Korea Utara (Korut) menyatakan semua perjanjian politik dan militer dengan Korea Selatan (Korsel) akan dianulir, termasuk perjanjian perbatasan di Laut Kuning. Dalam pernyataannya itu juga secara jelas disebutkan tentang pakta nonagresi yang ditandatangani kedua negara tahun 1991, juga akan dibatalkan. Pakta nonagresi yang disebut sebagai Perjanjian Dasar menegaskan bahwa kedua negara tidak akan saling serang dan mengupayakan reunifikasi damai.

Keluarnya pernyataan itu telah mendorong kedua negara berada pada posisi "di ambang perang". Sungguh itu adalah suatu situasi yang tidak diinginkan masyarakat dunia yang tengah berupaya untuk menciptakan damai dan perdamaian di berbagai belahan dunia yang kini masih dilanda konflik dan perseteruan.

Kita berkeyakinan bahwa mayoritas rakyat Korut dan juga Korsel, bahkan masyarakat dunia, sangat mendukung terciptanya perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea. Kita juga berkeyakinan bahwa mayoritas rakyat kedua negara dan masyarakat dunia tidak menginginkan berulangnya kembali Perang Korea 1950-1953 yang menewaskan dan melukai sekitar dua juta orang Korea. Perang Korea adalah bagian dari lembaran gelap kedua negara yang membuat banyak keluarga bercerai-berai dan terpecah-belah.

Kini, ketika pemerintah Pyongyang mengambil keputusan untuk membatalkan semua perjanjian damai, baik politik maupun militer, tentu itu sangat kita sesalkan, tidak hanya kita prihatinkan. Kita, memang, tidak tahu persis apa yang melatari keluarnya keputusan itu: apakah berkaitan dengan rencana pemilihan anggota legislatif yang meski sering disebut sebagai "tukang stempel" belaka pada Maret mendatang? Apakah sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam menghadapi Korsel? Apakah untuk meningkatkan daya tawar dengan AS yang selama ini selalu bicara soal isu senjata nuklir Korut dan berada di belakang Korsel?

Semua itu tidak menjadi masalah. Yang pasti, keputusan itu telah merusak iklim, suasana, dan semangat perdamaian yang sebenarnya sudah mulai terasa di semenanjung itu. Keputusan itu juga hanya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru di Seoul.

Kita berharap situasi Semenanjung Korea, yang selama ini menjadi salah satu dari beberapa titik bahaya di dunia ini, yang bisa menjadi pemicu terjadi perang besar, tidak bertambah buruk. Kita juga berharap akan segera tercapai kesepakatan baru yang menuntun kedua negara ke meja perundingan damai. (Kompas)

**Jakarta, 2 Februari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu**